

BAB V KESIMPULAN

Timor Timur merupakan sebuah negara baru yang telah berhasil melepaskan diri dari Indonesia melalui jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999 lalu. Tentunya hasil tersebut sangat mengejutkan pemerintah Indonesia karena sudah sangat banyak sekali biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk berusaha membangun propinsi termuda di Indonesia tersebut, agar dapat mengembangkan dan memajukan sumber daya yang ada di propinsi Timor Timur semaksimal mungkin.

Sejarah Timor Timur adalah sejarah konflik. Berita mengenai Timor Timur banyak dibaca, didengar, atau ditayangkan media pers. Berita apa? Konflik dan pertentangan! Dan sejarah pertentangan ini merupakan sejarah panjang yang seakan-akan tidak akan pernah dihentikan. Sejarah yang bisa dirunut kemasa lalu sebelum bangsa Timor Timur bersentuhan dengan bangsa Barat.

Hak asasi manusia sebagai hak yang paling kodrati yang di miliki oleh setiap orang sejak lahir menjadi akan sangat diperhatikan apabila terdapat tindakan yang melanggar hak-hak tersebut, begitu juga pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur yang menyita perhatian dunia internasional, akan tetapi hal tersebut dapat di katakan terlambat karena pelanggaran HAM sudah terjadi di Timor Timur sejak tahun 1975 dan baru mendapat perhatian dunia internasional sekitar tahun 1990-an. Hal tersebut terjadi karena dalam suatu dimensi global sangatlah di pengaruhi oleh agenda politik global yang berkembang saat itu, dimana sebelum tahun 90-an isu atau agenda yang terdapat dalam politik dunia internasional adalah komunis, dimana komunis harus dimusubi dan dibancurkan

sehingga tindakan militer pemerintah Indonesia dalam penyelesaian masalah Timor Timur yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM didukung oleh dunia internasional saat itu karena Fretilin yang anti integrasi dianggap sebagai komunis sehingga harus di berantas dan dimusnahkan. Akan tetapi hal tersebut sudah berbeda sekali ketika isu HAM menjadi agenda dalam politik global yaitu setelah pasca perang dingin dan bubarnya Uni Soviet pada sekitar tahun 1991, dimana pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur menjadi perhatian dunia internasional dan hal tersebut sangatlah mempengaruhi Indonesia dalam pergaulan di dunia internasional, terutama sekali terhadap perjuangan diplomasi Indonesia ke luar negeri, hal tersebut terasa sangat berat karena adanya pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur.

Era baru ini ternyata berdampak besar pada tata hubungan internasional pada dasawarsa tahun 1990-an, perubahan yang mendasar dalam dinamika internasional dan globalisasi ditunjukkan dengan adanya perubahan sistem politik global dari bipolar ke multipolar, menguatnya interlinkages antara forum global, inter regional, regional, subregional, dan bilateral. Meningkatnya peranan aktor-aktor non negara dalam hubungan internasional dan munculnya isu-isu baru dalam agenda internasional seperti hak asasi manusia, demokratisasi, lingkungan hidup dan sebagainya yang dampak utamanya adalah semakin kaburnya batas dan kedaulatan negara dalam pergaulan antara bangsa. Selain itu keberadaan organisasi tersebut juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan dan mempertahankan keberadaan Hak Asasi Manusia, sehingga menyebabkan kasus-kasus HAM mudah terangkat ke forum internasional sebagaimana yang terjadi

dengan Indonesia yang menjadi sorotan internasional akibat adanya wacana pelanggaran HAM di Timor Timur.

Kajian hak asasi manusia sebagai isu global telah menciptakan suatu dialektika tersendiri di komunitas masyarakat internasional. Permasalahan yang masih diperdebatkan selama ini adalah adanya kontradiksi dan perbedaan persepsi mengenai nilai-nilai (values). Keanekaragaman nilai ini pada umumnya disebabkan karena didalam sebuah komunitas memiliki akar pengalaman historis yang berbeda-beda, sehingga standar dan perwujudan nilai HAM menjadi berlainan atau bahkan saling bertentangan. Dan hal ini yang menjadi senjata bagi Fretilin dalam memperjuangkan kemerdekaannya melalui terbentuknya citra negatif di dunia Internasional tentang kebijakan Indonesia di Timor Timur. Perbedaan persepsi terjadi antara Pemerintah Indonesia yang menganggap Fretilin adalah kelompok separatisme yang mengancam kedaulatan, sedangkan PBB, Amerika Serikat, Portugal, Australia, dan negara-negara lainnya menganggap Pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Timor Timur. Perbedaan persepsi inilah yang menjadikan konflik Indonesia-Fretilin menjadi konflik yang sangat diperhatikan dunia internasional bersamaan dengan berubahnya sistem dunia dunia paska Perang Dingin.

Tindakan melanggar hak asasi manusia dan hukum Humaniter internasional yang dilakukan di Timor Timur selama integrasi dengan Indonesia mulai tahun 1975 sampai dengan tahun 1999 telah dapat dimanfaatkan sebagai bahan publikasi dan kampanye yang menguntungkan gerakan anti integrasi